



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo dan Malang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCHAMAD ANAND RIVANDY.**
Pangkat, NRP : Kld Mpu, 132302.
Jabatan : Ur Tools Spare 2 Div Matalban Fligth IV Har.
Kesatuan : Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal.
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 12 Februari 2000.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : TD Wisma Tamtama Lanudal Juanda
Puspenerbal/Ds. Gelang RT. 03 RW. 04 Kec.
Tulangan Kab. Sidoarjo.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut :

Membaca, Berkas Perkara dari Pom Lantamal V Nomor BP-50/I-01/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Skuadron Udara 200 selaku Papera Nomor Kep/02/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/121/K/AL/VIII/2024 tanggal 04 Agustus 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
4. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Juktera/125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dan Nomor Juktera/125a-K/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 26 September 2024
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapsid/125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/121/K/AL/VIII/2024 tanggal 04 Agustus 2024, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq TNI-AL.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 5 (lima) lembar fotocopy Daftar Absensi Anggota Ron 200 Wing Udara 2 Puspenerbal a.n. Kld Mpu Mochamad Anand Rivandy NRP 132302 sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang :

1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:
 - a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1283/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1297/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
 - c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/1383/IX/2024 tanggal 11 September 2024 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung panggilan Oditur Militer tersebut, Komandan Skuadron Udara

200 selaku Papera Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat:

- Nomor R/388/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024.
- Nomor R/407/IX/2024 tanggal 5 September 2024.
- Nomor B/422/IX/2024 tanggal 17 September 2024.

yang menerangkan bahwa Terdakwa Mochamad Anand Rivandy, Kld Mpu NRP 132302, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan (Masih Desersi).

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”. Lebih lanjut dalam Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa”.

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang, bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara *in absentia* di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifannya dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara *in absentia*, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua puluh dua bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan tanggal Dua puluh dua bulan Mei tahun 2000 dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat sampai dengan bulan Mei tahun 2000 dua puluh empat, setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif di Skuadron Udara Wing Udara 2 Puspenerbal dengan pangkat Kld Mpu NRP 132302.
2. Bahwa para Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan yang sah atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 atau selama 122 (seratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinast di TNI AL dan dari sejak awal tidak mempunyai niatan menjadi seorang militer.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak diketahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan.
5. Bahwa dari pihak satuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian di rumah orang tuanya di Ds. Gelang RT. 03 RW. 04 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, di daerah Malang, Jombang dan Mojokerto namun Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang, selanjutnya Komandan Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal selaku Anku melimpahkan perkara Terdakwa ke Pom Lantamal V sesuai surat Nomor R/184/IV/2024 tanggal 24 April 2024.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22 Mei 2024 dan selama 122 (seratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal **87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM**.

Menimbang, bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena para Saksi ada kepentingan dinas di kesatuan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **HIRMANTO**.
Pangkat, NRP : Lettu Laut (T), 21661/P.
Jabatan : Kadiv HAR Pesud Satar Fligth IV Ron 200 Wing Udara 2.
Kesatuan : Puspenerbal.
Tempat, tanggal lahir : Ngawi, 10 November 1975.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pulungan III Nomor 12 RT 07 RW 01 Kel. Betro Kec. Sedati Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 di Skuadron Udara 200 hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan yang sah atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 atau selama 122 (seratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal.
3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinasi di TNI AL.
4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atas lain yang berwenang, Terdakwa tidak

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmembawa barang inventaris milik satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa dari pihak satuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian di rumah orang tuanya di Ds. Gelang RT. 03 RW. 04 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo dan menghubungi nomor HP Terdakwa namun tidak aktif dan Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang.

6. Bahwa Saksi selaku kepala bagian Terdakwa di Kesatuan menilai kinerja Terdakwa selama berdinass sangat buruk pada saat diberi perintah maupun melaksanakan tugas selain itu Saksi mengetahui selama Terdakwa berdinass di TNI AL pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran berdasarkan Keputusan Komandan Wing Udara 2 Nomor Kep/09/XI/2022 tanggal 11 November 2022 karena tidak mengikuti apel pagi dan apel siang selama 3 (tiga) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **PAIMAN.**

Pangkat, NRP : Peltu Mpu, 86630.

Jabatan : Bama Ron 200 Wing Udara 2.

Kesatuan : Puspenerbal.

Tempat, tanggal lahir : Malang, 12 November 1975.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Jl. Punden RT. 41 RW. 03 Jatikerto Kromengan Kab. Malang

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2021 di Skadron Udara Wing Udara 2 Puspenerbal hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan yang sah atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 atau selama 122 (seratus dua puluh dua) hari secara berturut-turut dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Skadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal.

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa tidak berniat menjadi seorang militer.

4. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atas lain yang berwenang, Terdakwa tidak

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembawa barang inventaris milik satuan dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa dari pihak satuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian di rumah orang tuanya di Ds. Gelang RT. 03 RW. 04 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, di daerah Malang, Jombang dan Mojokerto namun tidak aktif dan Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang.

6. Bahwa Saksi selaku kepala bagian Terdakwa di Kesatuan menilai kinerja Terdakwa selama berdinass sangat buruk pada saat diberi perintah maupun melaksanakan tugas selain itu Saksi mengetahui selama Terdakwa berdinass di TNI AL pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran berdasarkan Keputusan Komandan Wing Udara 2 Nomor Kep/09/XI/2022 tanggal 11 November 2022 karena tidak mengikuti apel pagi dan apel siang selama 3 (tiga) hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat dari Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal Nomor B/422/IX/2024 tanggal 17 September 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa a.n. Mochamad Anand Rivandy, Kld Mpu NRP 132302, tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan. sehingga Terdakwa tidak dapat dihadirkan menghadap penyidik untuk dilakukan pemeriksaan, dan selanjutnya sampai dengan persidangan dimulai, Terdakwa tetap tidak hadir di persidangan, karena sejak awal Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan sehingga Terdakwa tidak dapat diambil keterangannya di persidangan.

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 5 (lima) lembar fotocopy Daftar Absensi Anggota Ron 200 Wing Udara 2 Puspenerbal a.n. Kld Mpu Mochamad Anand Rivandy NRP 132302 sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana tidak hadir tanpa ijin sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1, dan Saksi-2 yang dibacakan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti Terdakwa melakukan tindak pidana yang berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta berkaitan erat dengan perkara tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai beberapa kriteria cara menghitung lamanya waktu tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa yaitu:

- a. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh Penyidik.
- b. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
- c. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada poin ketiga (poin c) dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap Tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur keempat tentang lebih lama dari tiga puluh hari, Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang rentang waktu/lamanya waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan pembuatan Surat Dakwaan pada tanggal 04 Agustus 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 8 Oktober 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadirannya tanpa ijin tersebut adalah sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 8 Oktober 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tersebut adalah selama 261 (dua ratus enam puluh satu) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Skadron Udara Wing Udara 2 Puspenerbal dengan pangkat Kld Mpu NRP 132302.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan yang sah atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Januari 2024 dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Skadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal dan hal tersebut diketahui oleh Lettu Laut (T) Harminto (Saksi-1) dan Peltu Mpu Paiman (Saksi-2).
3. Bahwa benar menurut keteangan para Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinas di TNI AL dan dari sejak awal tidak mempunyai niatan menjadi seorang militer.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak diketahui kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan.
5. Bahwa benar dari pihak satuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian di rumah orang tuanya di Ds. Gelang RT. 03 RW. 04 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, di daerah Malang, Jombang dan Mojokerto namun tidak aktif dan Terdakwa tidak diketemukan sampai dengan sekarang, selanjutnya Komandan Skadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal selaku Ankum melimpahkan perkara Terdakwa ke Pom Lantamal V sesuai surat Nomor R/184/IV/2024 tanggal 24 April 2024.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Skadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan diputus perkaranya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 8 Oktober 2024 atau selama 261 (dua ratus enam puluh satu) hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dan pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, yang telah dikemukakan oleh Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dalam sidang Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "Militer" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan negara melalui TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Skadron Udara Wing Udara 2 Puspenerbal dengan pangkat Kld Mpu NRP 132302.
2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI AL hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi.

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa sebagai prajurit aktif dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Skadron Udara 200 selaku Papera Nomor Kep/02/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 tentang Penyerahan Perkara.

4. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/121/K/AL/VIII/2024 tanggal 04 Agustus 2024, didakwa telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

5. Bahwa benar sesuai keterangan para Saksi, sebelum Terdakwa pergi meninggalkan kesatuannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan "kesengajaan" sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Skadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan yang sah atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Januari 2024 dengan cara tidak mengikuti apel pagi dan apel siang di Kesatuan Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal dan hal tersebut diketahui oleh Lettu Laut (T) Harminto (Saksi-1) dan Peltu Mpu Paiman (Saksi-2).
2. Bahwa benar menurut keteangan para Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang lain yang berwenang dikarenakan Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinasi di TNI AL dan dari sejak awal tidak mempunyai niatan menjadi seorang militer.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, tidak diketahui kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak membawa barang inventaris militer milik satuan.
4. Bahwa benar dari pihak satuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara melakukan pencarian di rumah orang tuanya di Ds. Gelang RT. 03 RW. 04 Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo, di daerah Malang, Jombang dan Mojokerto namun tidak aktif dan Terdakwa tidak ditemukan sampai dengan sekarang, selanjutnya Komandan Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal selaku Ankuum melimpahkan perkara Terdakwa ke Pom Lantamal V sesuai surat Nomor R/184/IV/2024 tanggal 24 April 2024.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan diputus perkaranya di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 8 Oktober 2024 dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga "Dalam waktu damai" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berakut bermaksud untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan diputusnya perkara ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan diputusnya perkara ini, Terdakwa maupun kesatuan Skuadron Udara 200 Wing Udara 2 Puspenerbal tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidakhadiran seseorang militer di suatu kesatuan, dimana ketidakhadiran tanpa ijin tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus/berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan di periksa dan diputus secara *in absentia* dalam persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 8 Oktober 2024, secara berturut-turut telah meninggalkan satuan selama 261 (dua ratus enam puluh satu) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 261 (dua ratus enam puluh satu) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari." Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, ini Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan Terdakwa sudah tidak mau lagi berdinasi di TNI dan memilih untuk menghindari dari tanggungjawab dengan meninggalkan satuan tanpa ijin atasan yang berwenang dengan mengabaikan tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasnya, hal ini menunjukkan rendahnya disiplin dan mental Terdakwa dengan tidak melaksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap remeh prosedur perijinan di kesatuan dan berbuat sekehendak hatinya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang kuat sebagai prajurit.
2. Bahwa akibat dari perbuatan ini dapat mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di Kesatuan.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa pembelaan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan Keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.
3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat yaitu:

- 5 (lima) lembar fotocopy Daftar Absensi Anggota Ron 200 Wing Udara 2 Puspenerbal a.n. Kld Mpu Mochamad Anand Rivandy NRP 132302 sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 125-K/PM.III-12/AL/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *jo* Ayat (2) *jo* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 143 *jo* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **MOCHAMAD ANAND RIVANDY**, Kld Mpu NRP 132302, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “**Desersi dalam waktu damai.**”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 5 (lima) lembar fotocopy Daftar Absensi Anggota Ron 200 Wing Udara 2 Puspenerbal a.n. Kld Mpu Mochamad Anand Rivandy NRP 132302 sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Mei 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 oleh Sugeng Aryanto, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980058680275 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Musthofa, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607969 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P., Mayor Laut (H) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Putri Dewi Ayu Amarylis, S.H., Kapten Chk (K) NRP 21990196430879, Panitera Pengganti Slamet Pelda NRP 21020097980681, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 607969

Sugeng Aryanto, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11980058680275

Ttd

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H., M.A.P.
Mayor Laut (H) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Ttd

Slamet
Pelda NRP 21020097980681

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Cap/Ttd

Kholip, S.H.
Kapten Kum NRP 519169